



Nomor: SP-5/PWK.6/2025

## **Penerimaan Perpajakan Tumbuh Positif Memperkuat Perekonomian di Sumsel**

Penerimaan perpajakan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan & cukai tumbuh positif sebesar 1,03% (yoy). Tren positif kinerja realisasi penerimaan perpajakan didukung oleh tren positif pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tumbuh signifikan sebesar 102,3%. Pertumbuhan penerimaan PBB ditopang oleh peningkatan pembayaran pada sektor PBB perkebunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencatatkan pertumbuhan sebesar 125,51% (yoy) dengan capaian kinerja realisasi sebesar 80,05% dari target tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno forum *Asset and Liability Committee (ALCo)* Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Mei 2025.

Penerimaan pajak penghasilan di Sumsel sampai dengan April 2025 mencapai Rp1,69 triliun atau 29,83% dari target APBN. Terdapat fitur baru pada *coretax* berupa deposit pajak yang pembayaran belum terikat ke suatu jenis pajak atau jenis setoran tertentu. Apabila deposit pajak terdistribusikan ke pajak penghasilan, maka PPh akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,96 (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp793,56 miliar dengan komponen penerimaan kepabeanan dan cukai, pajak dalam rangka impor dan ekspor, dan penerimaan lainnya. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp206,60 miliar yang mencapai 80,05% dari target Rp258,09 miliar atau tumbuh positif 125,51% (yoy). Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar sampai dengan April 2025 didominasi produk CPO dan turunannya. Penerimaan Bea keluar tumbuh positif 620,44% (yoy) selain dipengaruhi oleh kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) juga karena peningkatan volume ekspor produk CPO dan turunannya sebesar 25,86%.





Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp899,61 miliar atau 37,40% dari target. Penerimaan dari sisi PNBP terjaga optimal yang ditunjukkan melalui capaian kinerja pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan pendapatan PNBP Lainnya. Pendapatan PNBP BLU mencapai Rp532,32 miliar atau 27,75% dari target, dan pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp367,29 miliar atau 75,41% dari target. Penerimaan PNBP Lainnya ini termasuk PNBP yang berasal dari aset, piutang, dan lelang di wilayah Sumsel, penerimaan ini menunjukkan tren positif yang secara agregat tumbuh 15,76% mencatatkan angka Rp22,35 miliar atau 38,09% dari target.

Sementara itu, dari sisi belanja negara menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi sebesar Rp12,7 triliun atau mencapai 25,87% dari pagu. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,31 triliun atau 20,97% dari pagu, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,47 triliun atau mencapai 28,16% dari pagu. Belanja pemerintah pusat berupa belanja pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan kinerja ASN, TNI, dan Polri, serta uang makan, honorarium, uang lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR) mengalami pertumbuhan positif. Belanja bantuan sosial yang dipergunakan untuk kegiatan ATENSI dari Kemensos dan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami pertumbuhan positif.

Transfer Ke Daerah berupa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp2.518,48 miliar atau 22,65% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp4.466,06 miliar atau 31,84% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1.444,78 miliar atau 28,83% dari alokasi pagu. Penyaluran Dana Desa mencatatkan Rp1.037,39 miliar atau 41,56% dari pagu, yang penyaluran tercepat pada 6 kabupaten di wilayah Sumsel yaitu Kabupaten OKU Timur, Muba, OKI, OI, dan Lahat. Penyaluran Dana Insentif mencatatkan Rp4,51 miliar atau 6,69% dari pagu yang mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai kesimpulan, aktivitas perekonomian di Sumsel menunjukkan aktivitas menguat melalui dukungan kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Sumsel tahun 2025 yang tumbuh positif dari sisi penerimaan perpajakan. Kementerian Keuangan terus berupaya mendukung APBD pada 18 pemda di wilayah Sumsel dengan mengoptimalkan penyaluran dana TKD sebagai instrumen membangun daerah.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SIARAN PERS



Narahubung:

**Muhamad Octariyaddi**

Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik  
Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan  
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang  
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Sukajaya, Palembang 30151